

**FENOMENA PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
(JKN) DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SUMBERJAMBE
KABUPATEN JEMBER**

Oleh:

Winda Aribatun Nafi'ah, Supriyadi, Sasmiyanto

**Jl. Karimata 49 Jember Telp: (0331) 332240 Fax: (0331) 337957 Email:
fikes@unmuhjember.ac.id Website: <http://fikes.unmuhjember.ac.id>**

ABSTRAK

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. Permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas merupakan suatu bentuk evaluasi terhadap kinerja Puskesmas dalam melakukan Tugas-tugasnya didalam program JKN tersebut. Pada penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan tujuan untuk melihat gambaran fenomena yang terjadi pada populasi tertentu. Pada umumnya digunakan untuk membuat penilaian terhadap suatu kondisi dan penyelenggaraan suatu program di masa sekarang, kemudian hasilnya digunakan untuk menyusun perencanaan perbaikan program tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat dan tenaga kesehatan di Puskesmas Sumberjambe dengan sampel 30 responden dari masyarakat dan 18 responden dari perawat yang ada di Puskesmas Sumberjambe. Instrumen yang digunakan yaitu instrumen kepesertaan, instrumen pelayanan, dan instrumen tenaga kesehatan. Hasil penelitian yang didapat pada Pelaksanaan JKN di Puskesmas Sumberjambe yaitu 93,3% responden mengatakan Pelaksanaan JKN di Puskesmas Sumberjambe pada item Kepesertaan sudah sangat baik, 90,2% responden mengatakan Pelaksanaan JKN di Puskesmas Sumberjambe pada item Pelayanan sudah sangat baik, dan 99,3% responden mengatakan Pelaksanaan JKN di Puskesmas Sumberjambe pada Tenaga Kesehatan juga sudah sangat baik. Kesimpulan penelitian ini adalah Pelaksanaan JKN di Puskesmas Sumberjambe tidak mengalami banyak permasalahan (kecurangan) itu demua dapat dibuktikan dengan pernyataan masyarakat Sumberjambe bahwa Pelaksanaan JKN berjalan dengan baik. Dari hasil penelitian ini diharapkan untuk kedepan Puskesmas Sumberjambe dapat mempertahankan kinerjanya dalam menjalankan program pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kata kunci : Permasalahan; JKN.

Daftar Pustaka 16 (2002-2015)

ABSTRACT

*The National Health Insurance Program (JKN) aims to provide a guarantee of health insurance for all the people of Indonesia to Indonesian people can live healthy, productive, and prosperous. The problems that occurred in the implementation of the National Health Insurance in primary health care is a form of evaluation of the performance of health centers in performing his tasks within the program JKN. In this research use descriptive research with the aim to see the picture of the phenomenon that occurs in certain populations. It is generally used to make an assessment of the conditions and the implementation of a program in the present, then the results are used to draw up the program improvement plan. The population in this study is the public and health workers in health centers Sumberjambe with a sample of 30 respondents from the public and 18 respondents from nurses in health centers Sumberjambe. The instruments used are the instruments of membership, service instrument, and an instrument of health personnel. Research results obtained in implementation of PHC Sumberjambe JKN in which 93.3% of respondents said the implementation of JKN in Puskesmas Sumberjambe on *Kepesertaan* item is already very good, 90.2% of respondents said the implementation of JKN in Puskesmas Sumberjambe the item is already very good performance, and 99, 3% of respondents said the implementation of JKN in Puskesmas Sumberjambe on *Health Workers* have also been very good. It is concluded that implementation of JKN in Puskesmas Sumberjambe not experienced many problems (cheating) was demua can be evidenced by the public statements that the Implementation JKN Sumberjambe going well. From the results of this study are expected for the future Sumberjambe health center can maintain its performance in implementing programs for the implementation of the National Health Insurance (JKN).*

Keywords: Problems; JKN.

References 16 (2002-2015)

PENDAHULUAN

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. Yang menggunakan prinsip asuransi sosial kegotongroyongan yang kepesertaannya bersifat wajib dan tidak selektif, dan di kelola dengan prinsip nirlaba dan diwajibkan membayar premi. Terdapat dua cara pembayaran premi yaitu untuk masyarakat non miskin premi dibayar sendiri oleh peserta non PBI atau peserta mandiri, sedangkan untuk masyarakat miskin, premi dibayarkan oleh pemerintah karena

termasuk Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Peserta Non PBI yaitu Peserta yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu, seperti pekerja swasta, PNS, anggota TNI dan Polri serta pegawai informal yang tidak termasuk golongan PBI (Menkes, 2013).

Jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga Desember 2014 mencapai lebih dari 131 juta jiwa, sudah melebihi target yang ditetapkan sebelumnya. Secara umum dapat dikatakan bahwa masyarakat luas menerima program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan cukup baik. Saat ini, kelompok Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau yang lebih dikenal dengan sebutan peserta mandiri menjadi perhatian Pemerintah, karena jumlahnya terus meningkat, yakni mencapai 7.634.687 jiwa (5%). Sejak awal diluncurkan, kelompok peserta ini menunjukkan grafik peningkatan yang cukup signifikan. Namun, seringkali peserta dari kelompok ini yang baru mendaftarkan dirinya saat

sakit, tanpa mengikutsertakan keluarganya.

Tahun 2019 mendatang, ditargetkan 95% penduduk Indonesia sudah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/ Kartu Indonesia Sehat (KIS), sehingga Universal Health Coverage (UHC) diharapkan dapat tercapai. Untuk mencapai hal tersebut, akan terus diupayakan untuk ditingkatkan/dikuatkan mencakup: 1) Penguatan sosialisasi dan advokasi; 2) Evaluasi berkala mengenai capaian kepesertaan dan penyesuaian target; serta 3) Penyiapan fasilitas kesehatan yang disesuaikan dengan pertumbuhan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/ Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Dari data yang sudah di jelaskan peserta yang mendaftar Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) jumlahnya semakin meningkat dan sudah melebihi target yang di tetapkan sebelumnya. Namun, Sejumlah persoalan muncul dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional dan Badan Pelaksana Jaminan Sosial Kesehatan. Padahal program sosial ini baru dua pekan bergulir, permasalahan masih

didominasi ketidaksiapan pemerintah dan BPJS Kesehatan dalam menyelenggarakan jaminan sosial bagi masyarakat. Di antaranya keterlambatan pembuatan regulasi operasional seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Peraturan Menteri Kesehatan berkontribusi, sehingga menimbulkan masalah di lapangan. Permasalahan pendaftaran menjadi peserta BPJS Kesehatan juga dikeluhkan masyarakat, karena banyak lokasi pendaftaran hanya ada di lokasi-lokasi tertentu saja, sehingga terjadi penumpukan calon pendaftar. Sehingga timbul beberapa permasalahan yang terjadi pada masyarakat, permasalahan yang terjadi pada pemberi layanan, permasalahan yang terjadi pada lembaga BPJS .

Sampai saat ini solusi untuk mengatasi masalah atau persoalan yang muncul dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih belum menemukan titik terang sehingga sampai saat ini permasalahan atau persoalan yang muncul dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional itu masih ada yang belum teratasi. Dari hasil

wawancara di masyarakat 6 dari 10 orang mengatakan bahwa masih keberatan untuk membayar iuran setiap bulan nya, ada juga yang pernah memaksa minta rujukan padahal masih bisa di tangani di puskesmas dan ada pula yang seharusnya dirujuk tetapi tidak ingin di rujuk dengan alasan biaya menjaga di rumah sakit atau juga karena kondisi pasien yang sudah lanjut. Karena itu peneliti tertarik untuk meneliti di Wilayah Kerja Puskesmas Sumberjambe Jember.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan tujuan untuk melihat gambaran fenomena yang terjadi pada populasi tertentu. Pada umumnya digunakan untuk membuat penilaian terhadap suatu kondisi dan penyelenggaraan suatu program di masa sekarang, kemudian hasilnya digunakan untuk menyusun perencanaan perbaikan program tersebut. Dalam hal ini peneliti ingin menggambarkan fenomena pelaksanaan Jaminan Kesehatan

Nasional (JKN) di Wilayah Kerja Puskesmas Sumberjambe.

Sampel yang diambil Peneliti sebanyak 30 responden dari pasien dan 18 responden dari perawat yang ada di Puskesmas Sumberjambe.

Teknik sampling yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Non-probability sampling dengan jenis purposive sampling

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kepesertaan Masyarakat

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan jika dilihat dari hasil yang di dapat pelaksanaan JKN di Puskesmas Sumberjambe khususnya pada Kepesertaan tidak banyak mengalami Permasalahan. Itu semua dapat dilihat dari 8 pertanyaan yang diajukan kepada responden hanya ada 2 pertanyaan yang terdapat hasil dari responden yang kurang memuaskan, yang pertama ada 20% responden yang mengatakan bahwa keberatan jika harus bayar iuran setiap bulan dan yang kedua 16,7% responden yang mengatakan masih sering telat atau menunggak dalam pembayaran iuran, menurut pendapat mereka jika mereka setiap bulan harus dibebankan untuk membayar iuran

mereka sangat keberatan dan kesusahan karena mereka masih belum mendapat penghasilan yang tetap dan juga uang penghasilan itu harus dibagi-bagi dengan kebutuhan yang lainnya dan juga 6,7% responden mengatakan bahwa mengikuti program JKN ini hanya demi kebutuhan sesaat saja dan selalu meminta paksa untuk dirujuk alasan mereka yaitu kalau misalnya untuk menjadi peserta umum mahal jika harus membutuhkan penanganan yang emergency, kalau hanya untuk berobat biasa masih bisa pakai kartu putih dari puskesmas yang berobat gratis dan lebih baik di Rumah Sakit dari pada di Puskesmas jika penyakitnya tak kunjung sembuh . Tetapi itu semua adalah responden yang menjadi peserta Non-PBI, sedangkan sebagian besar masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Sumberjambe menjadi peserta PBI yang dibantu pemerintah sepenuhnya sekitar 63,3%, tetapi menurut mereka adanya JKN atau BPJS ini sangatlah membantu bagi masyarakat terutama yang tidak mampu dan cara mengakses sarana kesehatan juga sangat mudah sekarang.

Dari hasil penelitian diatas sama dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan yang kemudian dilakukan perbaikan penjelasan dalam Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2013. Kepersertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib dan mencakup seluruh penduduk Indonesia.

2. Pelayanan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan pada pelaksanaan JKN di puskesmas Sumberjambe khususnya pada Pelayanan dapat diketahui pada kuisisioner yang diisi oleh Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan di puskesmas tersebut terdapat 4 pertanyaan, dari 4 pertanyaan tersebut hanya ada satu pertanyaan yang terdapat penilaian yang kurang bagus yaitu 38,9% perawat mengatakan bahwa jika ada pembengkakan pada pembiayaan pasien dalam program JKN PBI maupun Non-PBI harus di musyawarahkan kepada keluarga, alasan nya yaitu agar pasien tidak salah paham dan agar pembiayaan terbuka antara perawat dengan keluarga pasien.

Jika dilihat dari hasil diatas tidak sama dengan apa yang diterbitkan oleh Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, yang mengatakan bahwa Semua penanggungan biaya pada peserta PBI ditanggung oleh Pemerintah, dan Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan meliputi orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu.

3. Tenaga Kesehatan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan diketahui bahwa pada pelaksanaan JKN khususnya di bidang Tenaga Kesehatan di dapatkan hasil yang sangat memuaskan dari 5 pertanyaan yang terdapat pada kuisisioner nyaris tidak ada responden yang berpendapat negatif, hanya saja ada 1 responden yang mengatakan pernah merasa dinomor duakan, alasannya karna tidak segera ditangani keluhan yang dilaporkan keluarga pasien.

Menurut Mubarak & Chayatin (2013) pada peran ini perawat diharapkan mampu untuk memberikan pelayanan keperawatan

kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat sesuai diagnosis masalah yang terjadi mulai dari masalah yang bersifat sederhana, sampai masalah kompleks. Memerhatikan individu dalam konteks sesuai kehidupan klien. Perawat harus memerhatikan klien berdasarkan kebutuhan signifikannya. Menggunakan proses keperawatan dalam mengidentifikasi diagnosis keperawatan, mulai dari masalah fisik sampai psikologis dan tidak membedakan status pasien.

SIMPULAN DAN SARAN

Jika dilihat dari hasil penelitian diatas Pelaksanaan JKN di Puskesmas Sumberjambe sudah sangat baik baik dengan setiap item yang di teliti oleh peneliti menghasilkan presentase yang bagus dengan ditandai oleh sedikitnya responden yang menilai negatif di setiap item, berarti Pelayanan JKN di Puskesmas Sumberjambe sudah sangat baik dan memuaskan untuk masyarakat yang berada di wilayah kerja Puskesmas Sumberjambe tersebut. Dengan begitu berarti

Kinerja Tenaga Kesehatan Puskesmas Sumberjambe sangat mencerminkan pada Asas Keadilan, dimana asas keadilan terdapat pada sumpah perawat yang telah diucapkan tenaga kesehatan khususnya perawat sebelumnya.

Saran dari penelitian ini adalah Peran Puskesmas pada kegiatan ini sudah cukup baik, puskesmas disini sudah mengerjakan tugas-tugas nya dengan baik dan telah menjadi sarana yang dapat membantu masyarakat menyelesaikan masalah kesehatan, hanya saja puskes perlu meningkatkan kinerja perawat-perawat yg bekerja di puskesmas dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada, dan juga masih perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat terutama masalah tentang Pelaksanaan JKN.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2002. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Kemenkes RI, 2011. Standar Puskesmas Bidang Bina Pelaynan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Jakarta: Depkes RI

- Mubarak dan Chayatin. (2013). Ilmu Keperawatan Komunitas 1 Pengantar dan Teori. Jakarta: Salemba Medika.
- Nursalam.,et al. 2008. “Konsep Dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan”. Jakarta: Salemba Medika
- Nursalam.,et al. 2013. “Konsep Dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan”. Jakarta: Salemba Medika
- Peraturan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
- Sihombing, Nancy I. 2014. Hubungan Karakteristik Persepsi Masyarakat Tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Terhadap Keikutsertaan Menjadi Peserta JKN di Kota Medan. Skripsi, Universitas Sumatera Utara
- (UU No 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan) Sihombing, Nancy I. 2014
- (UU No 101 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan)
- (UU No 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional)
- Widyanto, Faisaldo. 2014. Keperawatan Komunitas dengan Pendekatan Praktis. Yogyakarta: Nuha Medika
- <http://www.depkes.go.id/resources/download/rakerkesnas-2015/regbarat/Sidang%20Komisi/Komisi%208.pdf>
- <http://www.depkes.go.id/resources/download/jkn/buku-pegangan-sosialisasi-jkn.pdf>

